

Disparitas Pendapatan Antardaerah di Indonesia

Etharina

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas pendapatan antardaerah di Indonesia dan melihat pengaruh suatu wilayah atau grup propinsi terhadap disparitas yang terjadi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Theil Entropy untuk melihat dimensi spasial dan disparitas regional. Penggunaan indeks Theil yang didekomposisi sangat membantu untuk memahami pengaruh spasial antar dan di dalam wilayah, maupun antar dan dalam grup propinsi. Hasil penelitian menemukan bahwa disparitas pendapatan per kapita yang terjadi antara (between) wilayah Jawa dan luar Jawa, serta antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia relatif kecil. Disparitas pendapatan per kapita yang lebih besar terjadi antara DKI Jakarta dan daerah lainnya, serta antara grup propinsi kaya dan grup propinsi miskin. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa disparitas justru semakin nyata terjadi di dalam (within) suatu wilayah, yaitu di dalam wilayah Jawa, Luar Jawa, KBI, dan KTI.

Kata kunci: disparitas pendapatan, koefisien Theil

Disparitas pendapatan antardaerah merupakan hal yang wajar dalam konsep pembangunan nasional. Pada tahap awal pembangunan ekonomi nasional, perbedaan laju pertumbuhan regional yang cukup besar antarprovinsi di Indonesia telah mengakibatkan disparitas dalam distribusi pendapatan antarprovinsi. Namun dalam jangka panjang, ketika faktor-faktor produksi semakin mobil (*mobile*), perbedaan laju pertumbuhan *output* antarprovinsi cenderung menurun bersamaan dengan meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata di setiap provinsi. Kondisi

tersebut sesuai dengan hipotesis Kuznets yang dikenal dengan 'hipotesis U terbalik'.

Disparitas regional di Indonesia disebabkan antara lain oleh kebijakan yang diterapkan selama pemerintahan Orde Baru. Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 1974 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat menguasai dan mengontrol hampir semua pendapatan daerah yang meliputi pendapatan dari hasil kekayaan alam di sektor pertambangan, minyak dan gas, serta perkebunan. Sumber-sumber pendapatan tersebut kemudian ditetapkan sebagai penerimaan negara. Akibat-

nya, daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak menikmati hasilnya secara layak (Hill 2001).

Pada awal pemerintahan orde baru para pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi akan menghasilkan *trickle down effects*. Strategi yang diterapkan pada saat itu difokuskan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam periode waktu yang singkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan ekonomi nasional dimulai dan dipusatkan di Pulau Jawa serta diprioritaskan pada sektor-sektor tertentu yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Sebagai akibat dari strategi tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an Indonesia menikmati laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi dengan tingkat kesenjangan yang juga semakin besar (Tambunan 2001).

Sejumlah studi telah dilakukan untuk melihat disparitas pendapatan di Indonesia beserta faktor-faktor penyebabnya. Penelitian yang dilakukan Akita dan Lukman (1995) melihat dispersi pendapatan per kapita antardaerah dan melakukan dekomposisi sektoral untuk mengetahui sektor ekonomi yang menjadi penyebab kesenjangan regional. Namun sayang, studi-studi tersebut tidak melihat aspek ruang (spasial) penyebab disparitas yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik disparitas spasial yang terjadi antarprovinsi dan wilayah di Indonesia. Untuk tujuan tersebut, penulis membuat pengelompokan wilayah-wilayah di

Indonesia yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta wilayah Jawa dan wilayah luar Jawa. Selain itu penulis juga mengelompokkan provinsi menjadi beberapa grup provinsi untuk melihat pengaruh suatu grup terhadap grup lainnya.

METODE PENELITIAN

Kerangka Teoritis

Literatur mengenai evolusi atau perubahan kesenjangan dalam distribusi pendapatan pada awalnya didominasi oleh hipotesis Kuznets. Dengan menggunakan data antarnegara (*cross section*) dan data dari sejumlah observasi runtun waktu (*time series*) setiap negara, Simon Kuznets menemukan suatu hubungan berbentuk U terbalik (*inverted U Hypothesis*) antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita.

Konsep tersebut memperoleh namanya dari bentuk rangkaian perubahan longitudinal (antarwaktu) atas distribusi pendapatan yang diukur berdasarkan koefisien Gini sejalan dengan pertumbuhan produk nasional bruto per kapita (Todaro 2000). Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi perdesaan ke suatu ekonomi perkotaan atau ekonomi industri.

Ahli-ahli klasik sangat mengabaikan analisis mengenai kegiatan ekonomi dari sudut penyebarannya di berbagai daerah. Menurut kaum klasik, mekanisme pasar akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang antar berbagai daerah. Harga-harga dinilai sangat fleksibel, faktor-faktor produksi diasumsikan sangat mobil dan informasi menge-

nai keadaan di berbagai daerah dianggap cukup sempurna sehingga perekonomian akan dengan sendirinya menghapus ketidakseimbangan yang terjadi. Ekonom klasik berpendapat bahwa ketidakseimbangan antardaerah hanya bersifat sementara (Sukimo dalam Lubis 1999).

Sebagaimana kaum klasik, Marxist dan Institusionalis juga tidak membahas mengenai ruang (*space*). Kegagalan Neoklasik, Marxist dan Institusionalis adalah karena mereka percaya bahwa: Pertama, mekanisme pasar akan bekerja menuju ke keseimbangan yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya, maupun menciptakan pertumbuhan yang cepat tanpa ada yang dirugikan dan tanpa memerlukan biaya, serta menjamin terjadinya distribusi pendapatan antardaerah. Kedua, adanya kepentingan dasar yang harmoni antara kelompok-kelompok sosial, masyarakat, daerah, dan negara. Ketiga, tidak adanya campur tangan pemerintah, tingkat mobilitas faktor produksi tidak membutuhkan biaya, dapat melakukan penyesuaian secara langsung, dan tidak ada yang dirugikan. Dengan asumsi-asumsi tersebut, analisis regional menjadi tidak menarik karena pasar bebas yakin tidak akan ada disparitas antardaerah (Higgins dan Savole 1995).

Secara umum, Marxist sebenarnya telah memberikan sedikit perhatian tentang ruang dibanding kaum Neoklasik. Ini dapat dilihat dari munculnya '*dependency theory*' (teori dependensi), dengan ruang dalam bentuk 'pusat' (*center*) sebagai monopoli kapitalis internasional dan 'pinggiran' (*periphery*) dalam bentuk daerah atau negara yang dieksploitasi. Dalam teori ini disparitas internasional

dan regional muncul karena adanya kapitalis (Higgins dan Savole 1995; Riddell 1985).

Kritik utama yang dilontarkan oleh para ekonom terhadap teori dependensi adalah bahwa tesis ketergantungan sangat menitikberatkan keterbelakangan yang terjadi akibat interaksi antara negara maju dan miskin. Tesis ini dinilai kurang proporsional dalam menempatkan interaksi yang terjadi di dalam negeri sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam menciptakan keterbelakangan dan ketergantungan terhadap negara lain (Kuncoro 1997).

Pertumbuhan output suatu daerah biasanya dipakai sebagai indikator dari pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut menarik modal dan tenaga kerja dari daerah lainnya. Pertumbuhan output per pekerja digunakan sebagai indikator perubahan tingkat keunggulan suatu daerah melalui pertumbuhan produktivitas, sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi.

Hasil penelitian yang dilakukan Soeroso dan Frank Biarratani (1985) di Indonesia dengan menggunakan Model Neoklasik menunjukkan bahwa perbedaan antardaerah dalam tingkat pertumbuhan *output* telah menarik modal dan tenaga kerja ke daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan menyebabkan instabilitas dalam pola pertumbuhan daerah di Indonesia.

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan antardaerah. Pembangunan ekonomi di daerah dengan tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat diban-

dingkan daerah yang memiliki tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi rendah. Begitu pula, konsentrasi penduduk di dalam dan di sekitar kota-kota besar biasanya diikuti dengan adanya disparitas pendapatan antardaerah (Akita dan Lukman 1995).

Kerugian yang dialami banyak daerah di wilayah luar Jawa, terutama KTI, disebabkan oleh terpusatnya kegiatan ekonomi nasional di wilayah Jawa. Ini merupakan salah satu contoh konkrit dari adanya dampak balik atau *backwash effects* (Arsyad 1999). *Backwash effects* adalah terjadinya proses pemusatan sumber-sumber ekonomi ke daerah kaya. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dan mendapatkan prasarana sosial yang lebih layak telah mendorong terjadinya perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah kaya. Perpindahan ini bersifat selektif karena penduduk yang bermigrasi umumnya adalah mereka yang memiliki pendidikan dan ketrampilan yang lebih tinggi. Kondisi demikian menurut Myrdal menjadikan daerah miskin menjadi semakin miskin dan daerah kaya menjadi semakin kaya. Perbedaan antara pusat dan daerah pinggirannya juga semakin melebar akibat adanya kausasi kumulatif (*cumulative causation*).

Selain *backwash effects* Myrdal juga mengemukakan adanya dampak sebar (*spread effects*). *Spread effects* menjelaskan bahwa pembangunan di daerah pusat pertumbuhan akan menyebabkan tambahan permintaan atas hasil-hasil di daerah belakangnya. Tetapi yang sering terjadi adalah *spread effects* jauh lebih kecil dari *backwash effects* sehingga secara keseluruhan pembangunan di daerah pusat pertumbuhan yang relatif lebih maju

justru memperlambat pembangunan di daerah belakangnya yang relatif masih miskin, terutama pada masa-masa awal pembangunan. Secara kumulatif kecenderungan ini akan semakin memperburuk disparitas regional yang ada.

Ada tiga tahap perkembangan keseimbangan pembangunan antardaerah. Tahap pertama terjadi sebelum industrialisasi dan ditandai dengan rendahnya kesenjangan antardaerah. Tahap kedua terjadi pada saat kesenjangan antardaerah semakin meningkat akibat adanya kausasi kumulatif dari *backwash effects* dan *spread effects*. Tahap ketiga terjadi ketika *spread effects* menjadi lebih besar dibanding *backwash effect* sehingga mampu mengurangi kesenjangan. *Spread effects* biasanya didorong oleh tindakan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya (Jhingan 2000).

Sejumlah literatur ekonomi menyatakan bahwa pendapatan per kapita di negara atau provinsi kaya dan miskin akan cenderung konvergen (Barro 1997). Konvergensi dapat terjadi ketika provinsi yang miskin tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan provinsi kaya (β convergence). Semakin tinggi pertumbuhan pendapatan per kapita provinsi miskin relatif terhadap provinsi kaya, semakin cepat terjadi konvergensi. β convergence kemudian akan menghasilkan σ convergence jika ada pengurangan dispersi pendapatan regional per kapita.

Teknik Analisis

Koefisien Theil merupakan indeks yang sangat populer digunakan untuk menganalisa distribusi spasial. Keunggulan dari koefisien Theil ini adalah sifatnya yang tidak sensitif terhadap skala daerah

dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim. Koefisien Theil juga independen terhadap jumlah daerah dan dapat digunakan untuk membandingkan kesenjangan-kesenjangan dari sistem regional yang berbeda-beda. Selain itu koefisien Theil dapat didekomposisi menjadi disparitas *between* (antara) dan disparitas *within* (dalam) wilayah atau grup provinsi secara simultan. Disparitas *between* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah disparitas antarwilayah atau grup provinsi, sedangkan disparitas *within* adalah disparitas yang terjadi di dalam satu wilayah atau grup provinsi tertentu. Koefisien Theil diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Terrasi 1999):

$$IC = \sum_i y_i \log(y_i / x_i) = IC_{br} + IC_{wr}$$

$$IC_{br} = \sum_r Y_r \log(Y_r / X_r)$$

$$IC_{wr} = \sum_r y_r \left[\sum_i (y_i / Y_r) \log(y_i / Y_r / x_i / X_r) \right]$$

dimana:

IC = disparitas total (total koefisien Theil)

IC_{br} = disparitas antar (between) wilayah atau grup provinsi

IC_{wr} = disparitas di dalam (within) wilayah atau grup provinsi

y_i dan x_i = pangsa pendapatan dan penduduk regional terhadap pendapatan dan penduduk nasional.

Y_r dan X_r = pangsa pendapatan dan penduduk dalam kelompok (grup) regional terhadap pendapatan dan penduduk nasional.

Wilayah yang diamati dalam penelitian ini adalah wilayah Jawa, wilayah luar Jawa, wilayah Indonesia bagian timur (Kawasan Timur Indonesia atau KTI) dan wilayah Indonesia bagian barat (Kawasan Barat Indonesia atau KBI). Wilayah juga berupa gabungan beberapa provinsi (grup provinsi). Disparitas *between* adalah koefisien yang menunjukkan besarnya ketimpangan yang terjadi antardua wilayah atau grup provinsi,

sedangkan disparitas *within* menunjukkan besarnya ketimpangan yang terjadi di dalam suatu wilayah atau grup provinsi.

Data

Penelitian ini menggunakan data nilai tambah produk domestik bruto (PDB) nasional dan produk domestik regional bruto (PDRB) per provinsi menurut lapangan usaha (sektor produksi) tahun 1983-2001. Analisis menggunakan data PDB dan PDRB dibedakan antara dengan dan tanpa minyak dan gas (migas). Migas dan hasil-hasilnya meliputi minyak dan gas bumi (*crude petroleum & natural gas*), yang di dalam penghitungan PDB dan PDRB termasuk dalam sektor pertambangan.

Pengamatan dilakukan pada periode tahun 1983-1997 dan mencakup 27 provinsi. Pada tahun 1998 Timor Timur melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga jumlah provinsi berkurang menjadi 26 buah. Pada tahun 2000 terjadi penambahan jumlah provinsi dari 26 menjadi 30 buah. Empat provinsi baru tersebut adalah Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, dan Maluku Utara.

ANALISIS DEKOMPOSISI DISPARITAS ANTARPROVINSI

Entropy mengukur seberapa merata suatu distribusi dan Theil *entropy* dapat menjelaskan dimensi spasial (ruang). Theil *entropy* dapat didekomposisi untuk melihat kesenjangan yang terjadi di antara (*between*) wilayah dan juga kesenjangan di dalam (*within*) wilayah pada suatu perekonomian.

Tanpa migas, dari tahun 1983 sampai 2001, disparitas regional tidak mengalami perubahan yang berarti. Hanya ketika krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997,

disparitas regional meningkat. Dengan migas, penurunan disparitas terlihat jelas sejak tahun 1983. Penurunan disparitas sedikit melambat setelah tahun 1992 hingga sebelum terjadi krisis ekonomi. Baik dengan migas maupun tanpa migas, disparitas regional meningkat saat terjadi krisis ekonomi (lihat Tabel 1 dan Gambar 1).

Secara nasional jumlah penduduk miskin meningkat akibat krisis ekonomi. Pada akhir tahun 1998, jumlah penduduk miskin di Indonesia, mencapai 49,5 juta jiwa atau 24,2 persen dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17,6 juta jiwa tinggal di perkotaan dan 31,9 juta jiwa lainnya berada di perdesaan. Selama krisis pula, pertumbuhan pendapatan per kapita provinsi-provinsi di Indonesia mengalami penurunan tajam.

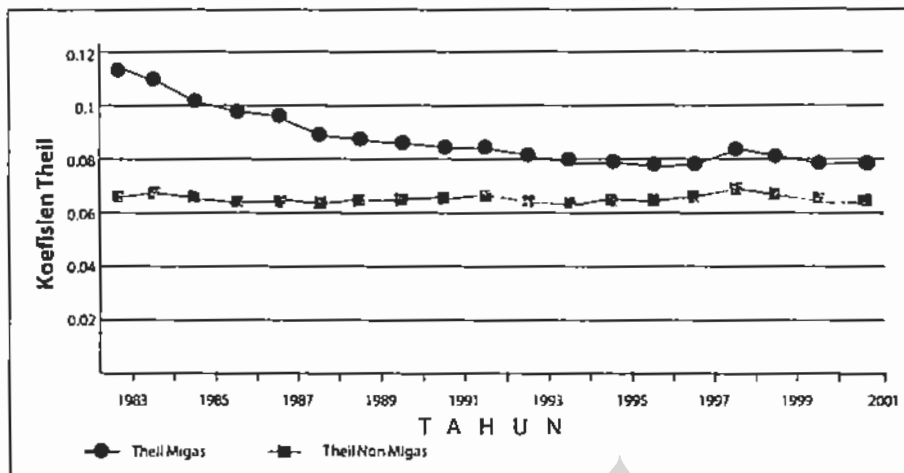
Untuk melihat dimensi spasial dari disparitas pendapatan yang terjadi di Indonesia, penelitian ini membagi wilayah

Indonesia menjadi beberapa wilayah analisis. Pertama, wilayah analisis dibagi menjadi wilayah Jawa dan luar Jawa. Kedua, pembagian wilayah berdasarkan kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). KBI mencakup provinsi-provinsi di pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Provinsi Bali. Sedangkan KTI meliputi provinsi-provinsi yang ada di pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ketiga, Akita dan Lukman (1995) mencoba menggabungkan provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam melihat disparitas regional dengan menggunakan Indeks Williamson. Begitu pula Hill (2001) yang berpendapat bahwa Jawa Barat merupakan perpanjangan wilayah ekonomi DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba melihat apakah kedua provinsi tersebut merupakan penyebab terjadinya disparitas regional di Indonesia. Keempat, Provinsi

Tabel 1. Koefisien Theil Total Dengan dan Tanpa Migas, Tahun 1983-2001

Tahun	Koef Theil dengan migas	Koef Theil tanpa migas
1983	0,1118	0,0651
1984	0,1083	0,0671
1985	0,1005	0,0653
1986	0,0965	0,0637
1987	0,0947	0,0643
1988	0,0869	0,0631
1989	0,0865	0,0641
1990	0,0850	0,0643
1991	0,0827	0,0648
1992	0,0831	0,0658
1993	0,0795	0,0633
1994	0,0788	0,0630
1995	0,0766	0,0636
1996	0,0762	0,0646
1997	0,0763	0,0654
1998	0,0824	0,0691
1999	0,0798	0,0659
2000	0,0769	0,0648
2001	0,0766	0,0647

Gambar 1.
Koefisien Theil Tahun 1983-2001



DKI Jakarta dipilih sebagai entitas tunggal perekonomian karena pendapatan per kapita tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya (tanpa migas). Bila migas dimasukkan ke dalam perhitungan, Provinsi ini tetap memiliki pendapatan per kapita yang tinggi yaitu urutan kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur. Kelima, kondisi regional dianalisis dengan membandingkan pendapatan per kapita provinsi sebagai persentase pendapatan per kapita nasional. Indeks pendapatan per kapita nasional adalah 100. Provinsi-provinsi yang memiliki pendapatan per kapita di atas rata-rata nasional dikelompokkan sebagai provinsi kaya dan sebaliknya provinsi yang memiliki pendapatan per kapita di bawah rata-rata nasional dikelompokkan ke dalam provinsi tidak kaya.

Pembagian wilayah seperti ini digunakan untuk melihat apakah disparitas yang terjadi antara provinsi kaya dan tidak kaya semakin mengecil atau semakin melebar. Sekali lagi, penelitian ini menga-

baikan kondisi sosial karena beberapa provinsi dengan pendapatan per kapita tinggi ternyata memiliki *Human Development Index* (HDI) yang buruk. Provinsi Papua misalnya, memiliki pendapatan per kapita yang berada jauh di atas rata-rata nasional (urutan keempat setelah Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Riau) namun memiliki HDI urutan kedua terburuk setelah Nusa Tenggara Barat (Brodjonegoro 2002).

Provinsi yang memiliki pendapatan per kapita (dengan migas) di atas rata-rata nasional adalah Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua. Jika migas dikeluarkan maka provinsi yang memiliki pendapatan per kapita di atas rata-rata nasional adalah Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua. Tingginya pendapatan per kapita provinsi tersebut karena seluruh provinsi tersebut, kecuali

DKI Jakarta dan Bali, kaya akan sumber daya alam. DKI Jakarta unggul dalam industri terutama industri manufaktur. Provinsi ini juga unggul dalam jasa terutama jasa hotel, perdagangan, hiburan dan jasa perbankan. Provinsi Bali menonjol karena jasa pariwisata, perdagangan, hotel dan restoran.

Sebelum mengestimasi disparitas yang terjadi antar (*between*) dan di dalam (*within*) wilayah yang diamati, terlebih dahulu dilakukan estimasi koefisien Theil total. Selanjutnya, dekomposisi dilakukan dengan menghitung koefisien *between* dan koefisien *within*. Berikut ini adalah beberapa temuan menarik yang diperoleh ketika dilakukan simulasi *between* dan *within* kelompok-kelompok wilayah yang diamati.

Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa disparitas antar wilayah terjadi antara wilayah Jawa dan luar Jawa, serta antara KBI dan KTI tidak sepenuhnya benar. Data menunjukkan bahwa Jawa dan KBI masing-masing menyumbang 60 persen dan 80 persen dalam pembentukan PDB. Namun, jumlah penduduk yang mendiami wilayah Jawa dan KBI masing-masing mencapai hampir 60 persen dan 80 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Artinya, perbandingan PDRB relatif terhadap jumlah penduduk sama dengan wilayah lainnya.

Kalau di luar Jawa banyak provinsi masih digolongkan miskin berdasarkan pendapatan per kapita, di Pulau Jawa pun masih ada provinsi miskin. Pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah misalnya, hanya mencapai 70 persen dari rata-rata nasional. Bahkan tiga provinsi lainnya yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta memiliki indeks pendapatan

per kapita di bawah rata-rata nasional. Hanya Banten, provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Jawa Barat, yang memiliki indeks pendapatan per kapita di atas 100.

Kondisi serupa juga terlihat bila kita membedakan disparitas antara KBI dan KTI. Kalau di KTI masih banyak dijumpai provinsi yang tertinggal jauh dibandingkan provinsi lain (misalnya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara), maka KBI juga memiliki provinsi yang cukup miskin yaitu Lampung, Bengkulu, dan Jawa Tengah. Indeks pendapatan per kapita Provinsi Bengkulu misalnya, selama tahun pengamatan semakin lama bahkan semakin kecil, relatif terhadap rata-rata nasional. Dari fakta tersebut, kita tidak bisa mengatakan begitu saja bahwa KBI lebih maju dibandingkan KTI.

Tabel 2 dan 4 menyajikan data koefisien total theil, koefisien *between* dan koefisien *within* wilayah dan grup provinsi masing-masing dengan dan tanpa migas. Nilai koefisien Theil menunjukkan seberapa merata distribusi pendapatan per kapita. Semakin kecil koefisien Theil, semakin rendah disparitas yang ada dan sebaliknya. Untuk memperjelas analisis maka koefisien *between* dan *within* grup dihitung dalam persentase terhadap total koefisien Theil dan hasilnya disajikan pada Tabel 3 (dengan migas) dan Tabel 5 (tanpa migas).

Tabel 3 dan Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase koefisien Theil *between* Jawa dan luar Jawa terhadap total disparitas regional sangat rendah yaitu sebesar 0,18 persen (dengan migas) dan 0,83 persen (tanpa migas). Begitu pula dengan disparitas yang terjadi antara KBI dan KTI baik dengan ataupun tanpa migas.

Hal cukup penting yang ditemui adalah disparitas justru terjadi di dalam

Tabel 2. Koefisien Total Theil, Between dan Within Grup Tahun 1983 - 2001

Tahun	Total Theil	Between Jawa Ljw		Within Jawa		Between KBI - KTI		Within KB		Between DKI Jbr - Luar		Within DKI Jbr		Between DKI - Luar		Within Luar		Between Kaya - Non		Within Kaya		Within Non	
1983	0,1118	0,00182	0,0420	0,0680	0,000006	0,0734	0,0384	0,0048	0,0303	0,0767	0,0345	0,0773	0,0616	0,0431	0,0071								
1984	0,1083	0,00101	0,0413	0,0659	0,000006	0,0649	0,0434	0,0063	0,0287	0,0732	0,0350	0,0733	0,0581	0,0428	0,0074								
1985	0,1005	0,00052	0,0404	0,0595	0,000003	0,0602	0,0403	0,0066	0,0287	0,0652	0,0352	0,0653	0,0535	0,0398	0,0072								
1986	0,0965	0,00044	0,0391	0,0569	0,000024	0,0596	0,0369	0,0063	0,0280	0,0622	0,0341	0,0623	0,0517	0,0379	0,0069								
1987	0,0947	0,00047	0,0391	0,0551	0,000078	0,0609	0,0337	0,0057	0,0288	0,0602	0,0343	0,0604	0,0528	0,0357	0,0062								
1988	0,0869	0,00027	0,0369	0,0497	0,000174	0,0569	0,0298	0,0052	0,0281	0,0536	0,0331	0,0538	0,0493	0,0318	0,0058								
1989	0,0865	0,00024	0,0398	0,0464	0,000227	0,0587	0,0275	0,0061	0,0293	0,0510	0,0353	0,0512	0,0501	0,0302	0,0062								
1990	0,0850	0,00011	0,0399	0,0450	0,000267	0,0582	0,0266	0,0065	0,0294	0,0492	0,0358	0,0493	0,0496	0,0296	0,0058								
1991	0,0827	0,00004	0,0402	0,0425	0,000207	0,0565	0,0260	0,0065	0,0300	0,0462	0,0364	0,0463	0,0485	0,0286	0,0056								
1992	0,0831	0,00002	0,0408	0,0422	0,000249	0,0575	0,0253	0,0065	0,0309	0,0457	0,0372	0,0458	0,0492	0,0285	0,0053								
1993	0,0795	0,00000	0,0418	0,0377	0,000390	0,0557	0,0234	0,0067	0,0319	0,0410	0,0384	0,0411	0,0506	0,0237	0,0052								
1994	0,0788	0,00000	0,0422	0,0366	0,000355	0,0547	0,0238	0,0067	0,0325	0,0397	0,0390	0,0398	0,0491	0,0246	0,0052								
1995	0,0766	0,00002	0,0429	0,0337	0,000394	0,0540	0,0222	0,0069	0,0333	0,0364	0,0400	0,0366	0,0477	0,0237	0,0052								
1996	0,0762	0,00005	0,0434	0,0327	0,000358	0,0537	0,0222	0,0071	0,0337	0,0354	0,0406	0,0356	0,0471	0,0236	0,0054								
1997	0,0763	0,00007	0,0441	0,0321	0,000339	0,0539	0,0221	0,0073	0,0341	0,0349	0,0412	0,0350	0,0469	0,0237	0,0056								
1998	0,0824	0,00069	0,0460	0,0357	0,000087	0,0558	0,0266	0,0034	0,0382	0,0408	0,0402	0,0422	0,0525	0,0255	0,0044								
1999	0,0798	0,00044	0,0434	0,0360	0,000038	0,0526	0,0272	0,0043	0,0348	0,0407	0,0384	0,0415	0,0496	0,0258	0,0044								
2000	0,0769	0,00018	0,0430	0,0338	0,000006	0,0515	0,0255	0,0053*	0,0336*	0,0381	0,0382	0,0388	0,0458	0,0263	0,0049								
2001	0,0766	0,00014	0,0435	0,0330	0,000001	0,0517	0,0249	0,0053*	0,0343*	0,0370	0,0388	0,0377	0,0450	0,0267	0,0049								

Catatan: Ljw = Luar Jawa, KBI = Kawasan Barat Indonesia, KTI = Kawasan Timur Indonesia, DKI Jbr = DKI Jakarta dan Jawa Barat.

* Termasuk Banten

PERPUSTAKAAN PUSAT

PERPUSTAKAAN PUSAT

Tabel 3. Persentase Koefisien Between dan Within Grup Terhadap Total Theil, Tahun 1983 - 2001 Dengan Migas

Tahun	Between		Within		Between		Within		Between		Within		Between		Within	
	Jawa-Liw	Liw	KBI-KTI	KBI	KTI	DKU Ibr - Luar	DKU Ibr	Luar	DKU - Luar	Luar	Kaya-Non	Kaya	Non	Kaya-Non	Kaya	Non
1983	1,62	37,57	60,80	0,01	65,65	34,34	4,26	27,12	68,62	30,89	69,11	55,10	38,52	6,38		
1984	0,93	38,19	60,88	0,01	59,94	40,05	5,85	26,54	67,61	32,29	67,71	53,64	39,49	6,87		
1985	0,51	40,25	59,23	0,00	59,90	40,09	6,56	28,52	64,92	35,00	65,00	53,28	39,60	7,12		
1986	0,46	40,56	58,98	0,03	61,77	38,20	6,48	29,00	64,51	35,39	64,61	53,64	39,25	7,11		
1987	0,50	41,34	58,16	0,08	64,33	35,59	6,01	30,39	63,60	36,19	63,81	55,72	37,73	6,55		
1988	0,31	42,45	57,24	0,20	65,51	34,29	6,01	32,38	61,61	38,10	61,90	56,75	36,55	6,70		
1989	0,28	46,01	53,71	0,26	67,89	31,84	7,03	33,93	59,03	40,79	59,21	57,93	34,95	7,13		
1990	0,13	46,96	52,91	0,31	68,38	31,31	7,62	34,54	57,84	42,04	57,96	58,33	34,81	6,85		
1991	0,05	48,56	51,39	0,25	68,30	31,45	7,88	36,24	55,88	43,98	56,02	58,68	34,58	6,74		
1992	0,02	49,13	50,84	0,30	69,19	30,51	7,85	37,15	55,00	44,82	55,18	59,29	34,32	6,40		
1993	0,01	52,61	47,38	0,49	70,03	29,48	8,37	40,10	51,53	48,27	51,73	63,68	29,79	6,53		
1994	0,00	53,54	46,46	0,45	69,40	30,15	8,44	41,23	50,33	49,43	50,57	62,25	31,20	6,55		
1995	0,03	56,02	43,95	0,51	70,48	29,00	8,96	43,46	47,58	52,17	47,83	62,30	30,90	6,80		
1996	0,07	56,98	42,95	0,47	70,43	29,10	9,38	44,17	46,45	53,34	46,66	61,87	31,03	7,10		
1997	0,10	57,77	42,13	0,44	70,62	28,93	9,50	44,77	45,73	54,06	45,94	61,53	31,10	7,38		
1998	0,84	55,85	43,31	0,11	67,66	32,24	4,12	46,39	49,49	48,76	51,24	63,72	30,99	5,29		
1999	0,56	54,40	45,04	0,05	65,92	34,03	5,41	43,66	50,94	48,06	51,94	62,14	32,32	5,54		
2000	0,23	55,84	43,93	0,01	66,87	33,12	6,85*	43,70*	49,45	49,61	50,39	59,50	34,13	6,37		
2001	0,18	56,77	43,05	0,00	67,48	32,52	6,88*	44,75*	48,36	50,70	49,30	58,76	34,85	6,39		

Sumber: Diolah dari Tabel 4.2
 Catatan: Liw = Luar Jawa, KBI = Kawasan Barat Indonesia, KTI = Kawasan Timur Indonesia, DKU Ibr = DKI Jakarta dan Jawa Barat.
 * Termasuk Banten

Tabel 4. Koefisien Total Theil, Between dan Within Grup, Tahun 1983 - 2001 Tanpa Migas

Tahun	Total Theil	Between		Within		Between		Within		Between		Within			
		Jawa-Ljw	Jawa-Ljw	Jawa	Ljw	KBI-KTI	KBI	KTI	DKI Jbr - Luar	DKI Jbr	Luar	DKI - Luar	Luar	Kaya - Non	
1983	0,0651	0,0018	0,0550	0,0084	0,0010	0,0578	0,0063	0,0109	0,0438	0,0104	0,0546	0,0106	0,0282	0,0060	0,0310
1984	0,0671	0,0027	0,0555	0,0089	0,0011	0,0589	0,0071	0,0134	0,0431	0,0107	0,0564	0,0107	0,0292	0,0053	0,0326
1985	0,0653	0,0032	0,0533	0,0088	0,0013	0,0570	0,0070	0,0139	0,0410	0,0104	0,0549	0,0104	0,0277	0,0053	0,0323
1986	0,0637	0,0029	0,0514	0,0093	0,0011	0,0551	0,0076	0,0130	0,0398	0,0110	0,0528	0,0110	0,0271	0,0053	0,0313
1987	0,0643	0,0026	0,0512	0,0104	0,0009	0,0547	0,0086	0,0122	0,0400	0,0120	0,0522	0,0120	0,0282	0,0054	0,0307
1988	0,0631	0,0023	0,0497	0,0111	0,0008	0,0532	0,0091	0,0117	0,0388	0,0127	0,0504	0,0127	0,0282	0,0055	0,0293
1989	0,0641	0,0025	0,0509	0,0107	0,0009	0,0546	0,0086	0,0122	0,0395	0,0124	0,0517	0,0124	0,0287	0,0055	0,0298
1990	0,0643	0,0028	0,0510	0,0105	0,0009	0,0551	0,0084	0,0124	0,0397	0,0122	0,0521	0,0122	0,0289	0,0055	0,0299
1991	0,0648	0,0029	0,0511	0,0108	0,0007	0,0556	0,0084	0,0123	0,0400	0,0125	0,0523	0,0125	0,0294	0,0055	0,0299
1992	0,0658	0,0031	0,0519	0,0109	0,0007	0,0565	0,0086	0,0124	0,0409	0,0126	0,0532	0,0126	0,0300	0,0054	0,0304
1993	0,0633	0,0021	0,0488	0,0125	0,0009	0,0523	0,0101	0,0117	0,0377	0,0139	0,0494	0,0139	0,0339	0,0051	0,0244
1994	0,0630	0,0021	0,0486	0,0123	0,0011	0,0522	0,0097	0,0115	0,0378	0,0137	0,0493	0,0137	0,0332	0,0052	0,0246
1995	0,0636	0,0021	0,0488	0,0127	0,0010	0,0525	0,0101	0,0114	0,0381	0,0141	0,0495	0,0141	0,0339	0,0052	0,0246
1996	0,0646	0,0021	0,0492	0,0132	0,0009	0,0531	0,0105	0,0112	0,0387	0,0147	0,0499	0,0147	0,0346	0,0053	0,0247
1997	0,0654	0,0020	0,0497	0,0137	0,0009	0,0537	0,0108	0,0110	0,0390	0,0153	0,0501	0,0153	0,0354	0,0055	0,0244
1998	0,0691	0,0001	0,0530	0,0160	0,0000	0,0556	0,0134	0,0062	0,0444	0,0185	0,0498	0,0193	0,0398	0,0043	0,0249
1999	0,0659	0,0003	0,0497	0,0159	0,0000	0,0525	0,0134	0,0077	0,0400	0,0181	0,0475	0,0184	0,0375	0,0042	0,0242
2000	0,0648	0,0005	0,0497	0,0147	0,0001	0,0528	0,0119	0,0086*	0,0394*	0,0168	0,0472	0,0176	0,0353	0,0050	0,0245
2001	0,0647	0,0005	0,0500	0,0141	0,0001	0,0532	0,0113	0,0087*	0,0398*	0,0162	0,0477	0,0170	0,0348	0,0050	0,0250

Catatan: Ljw = Luar Jawa, KBI = Kawasan Barat Indonesia, KTI = Kawasan Timur Indonesia, DKI Jbr = DKI Jakarta dan Jawa Barat.

*Termasuk Banten

Tabel 5. Persentase Koefisien Between dan Within Grup Terhadap Total Theil, Tahun 1983 - 2001 Tanpa Migas

Tahun	Between		Within		Between		Within		Between		Within		
	Jawa-Ljw	Jawa	Ljw	KBI	KTI	DKI Jbr - Luar	DKI Jbr	Luar	DKI - Luar	Luar	Kaya - Non	Kaya	Non
1983	2,72	84,44	12,84	88,79	9,67	16,76	67,29	15,95	83,80	16,20	43,29	9,14	47,57
1984	4,02	82,68	13,30	87,77	10,52	19,92	64,20	15,89	84,11	15,89	43,53	7,89	48,58
1985	4,86	81,60	13,55	87,30	10,68	21,27	62,80	15,93	84,04	15,96	42,47	8,06	49,48
1986	4,61	80,72	14,67	86,43	11,88	20,36	62,44	17,20	82,79	17,21	42,52	8,33	49,15
1987	3,99	79,75	16,26	85,15	13,42	19,02	62,25	18,74	81,26	18,74	43,96	8,33	47,70
1988	3,64	78,74	17,62	84,30	14,50	18,48	61,46	20,07	79,93	20,07	44,74	8,74	46,52
1989	3,85	79,39	16,76	83,18	13,48	18,97	61,72	19,31	80,69	19,31	44,80	8,66	46,54
1990	4,36	79,25	16,39	85,62	13,05	19,29	61,71	19,00	81,00	19,00	44,95	8,52	46,53
1991	4,52	78,80	16,68	85,85	13,03	18,97	61,70	19,33	80,67	19,33	45,33	8,50	46,17
1992	4,66	78,80	16,54	85,84	13,05	18,78	62,07	19,16	80,84	19,16	45,64	8,16	46,20
1993	3,26	77,04	19,70	82,59	15,96	18,44	59,61	21,95	78,04	21,96	53,46	8,08	38,47
1994	3,30	77,20	19,50	82,97	15,34	18,23	60,08	21,69	78,31	21,69	52,78	8,18	39,04
1995	3,31	76,73	19,96	82,57	15,86	17,86	59,97	22,17	77,83	22,17	53,24	8,16	38,60
1996	3,27	76,24	20,49	82,26	16,32	17,34	59,97	22,69	77,31	22,69	53,55	8,22	38,23
1997	3,02	76,00	20,98	82,13	16,50	16,88	59,69	23,43	76,56	23,44	54,15	8,48	37,37
1998	0,14	76,74	23,12	80,55	19,45	8,97	64,22	26,81	72,07	27,93	57,64	6,23	36,12
1999	0,39	75,46	24,14	79,63	20,29	11,71	60,76	27,53	72,10	27,90	56,92	6,34	36,73
2000	0,71	76,66	22,63	81,49	18,33	13,29*	60,84*	25,87	72,79	27,21	54,46	7,72	37,83
2001	0,83	77,30	21,87	82,27	17,51	13,47*	61,49*	25,04	73,70	26,30	53,73	7,68	38,60

Sumber: Diolah dari Tabel 4.2
 Catatan: Ljw = Luar Jawa, KBI = Kawasan Barat Indonesia, KTI = Kawasan Timur Indonesia, DKI Jbr = DKI Jakarta dan Jawa Barat.
 * Termasuk Banten

wilayah kawasan dan grup provinsi. Hal tersebut ditunjukkan oleh persentase koefisien Theil *within* terhadap koefisien Theil total yang mencapai sebesar 77,3 persen di dalam wilayah Jawa, 21,87 persen di wilayah luar Jawa, 82,3 persen di dalam KBI dan 17,5 persen di dalam KTI pada tahun 2001. Walau kontribusi disparitas di dalam hampir seluruh wilayah yang diamati menunjukkan kecenderungan menurun, angka-angka tersebut dinilai masih cukup tinggi.

Temuan menarik dari hasil penghitungan pada Tabel 5 adalah bahwa pola disparitas *within* Jawa, *within* KBI serta *between* DKI dan luar DKI relatif sama. Tanpa migas, disparitas *between* DKI dan luar DKI menyumbang 83,80 persen terhadap total disparitas di tahun 1983, sementara disparitas *within* Jawa menyumbang 84,44 persen dan disparitas *within* KBI menyumbang 88,79 persen terhadap total disparitas yang ada. DKI, yang terletak di wilayah Jawa dan KBI, dapat disimpulkan sebagai penyebab disparitas antardaerah yang relatif besar. Namun begitu, disparitas *between* DKI dan luar DKI menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, sebagaimana juga disparitas yang terjadi di *within* Jawa dan *within* wilayah KBI. Baik dengan ataupun tanpa migas, disparitas *within* di dalam wilayah Jawa ditambah luar Jawa dan di dalam KBI ditambah KTI menyumbang lebih dari 95 persen dari total disparitas regional. Sisanya, yaitu sebesar 5 persen, menunjukkan disparitas yang terjadi *between* Jawa dan luar Jawa, serta *between* KBI dan KTI.

Kedua, ketika DKI Jakarta digabung dengan Jawa Barat, kedua provinsi ini ternyata bukanlah penyebab disparitas

regional yang besar. Dengan migas, disparitas *between* DKI+Jawa Barat dan luar DKI+Jawa Barat hanya menghasilkan 4-10 persen dari disparitas regional yang ada. Tetapi tanpa migas, pengaruh kedua provinsi tersebut menjadi cukup besar terhadap kesenjangan regional. Ketika krisis ekonomi terjadi, disparitas *between* DKI+Jawa Barat dan luar DKI+Jawa Barat turun menjadi separuhnya. Hal ini dapat dipahami karena krisis sangat berdampak terhadap industri terutama industri manufaktur dan jasa-jasa penunjang yang banyak terdapat di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Ketika DKI Jakarta dianggap sebagai entitas perekonomian yang kuat, provinsi ini menjadi penyebab disparitas yang makin lama semakin melebar terhadap provinsi lainnya. Dengan migas, kesenjangan antara DKI dan luar DKI mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 1983 persentase *between* DKI Jakarta dan luar DKI Jakarta terhadap total koefisien Theil mencapai 30,89 persen, dan mencapai 54,06 persen di tahun 1997. Kesenjangan antara DKI Jakarta dan luar DKI Jakarta menurun saat dampak dari krisis ekonomi mulai dirasakan sejak tahun 1998.

Tanpa migas, perekonomian DKI Jakarta sangat mendominasi terjadinya ketidakmerataan regional. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di DKI Jakarta telah menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan yang signifikan. Pada tahun 1983, persentase kesenjangan *between* DKI Jakarta dan luar DKI Jakarta mencapai 83,80 persen terhadap total disparitas regional. Namun pada tahun-tahun berikutnya persentase tersebut semakin menurun. Di saat krisis ekonomi

disparitas antara Jakarta dan luar Jakarta mulai berkurang, walau masih cukup tinggi. Pada tahun 2001, disparitas antara Jakarta dengan luar Jakarta mencapai 73,70 persen.

Tidak bisa dipungkiri jika DKI Jakarta merupakan sumber pertumbuhan perekonomian nasional. Dari struktur fiskal, penerimaan asli daerah DKI mencapai 61,57 persen dari total penerimaan pusat daerah di tahun 1995. Sebagai perbandingan pada tahun yang sama, proporsi penerimaan asli daerah di provinsi-provinsi yang kaya akan sumber daya alam, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Kalimantan, dan Papua, relatif sangat kecil. Proporsi PAD terhadap total penerimaan pemerintah daerah di Provinsi Papua, misalnya, hanya 6,67 persen sementara di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam mencapai 18,06 persen, Kalimantan Barat dan Timur masing-masing 20,73 persen dan 23,98 persen (Basri dalam Tambunan 2001).

DKI Jakarta sebagai kutub pertumbuhan, melalui interaksi antarindustri diharapkan dapat memberikan efek sebar dan mendorong perkembangan sektor lain dan daerah lain yang merupakan kutub pertumbuhan pada hirarki yang lebih rendah, atau daerah yang lebih tertinggal. Namun, tampaknya proses tersebut tidak terjadi. Pemusatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi ini belum menunjukkan adanya *spread effects* seperti yang dinyatakan oleh Myrdal. Justru kausasi kumulatif dari *backwash effects*lah yang terjadi. Secara kumulatif kecenderungan ini akan semakin memperburuk disparitas dalam pendapatan per kapita antara Provinsi DKI Jakarta dengan provinsi-provinsi lainnya.

Ketiga, analisis terakhir dilakukan

dengan memisahkan provinsi kaya dan tidak kaya. Temuan yang menarik dari pemisahan tersebut adalah bahwa kesenjangan antara (*between*) provinsi kaya dan tidak kaya semakin melebar (Tabel 3 dan Tabel 5), yang disebabkan oleh besarnya peran sektor industri dalam perekonomian provinsi-provinsi kaya. Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi kaya memiliki keunggulan di sektor perkebunan, sedangkan Kalimantan Timur dan Papua memiliki konsentrasi yang kuat di sektor pertambangan. Saat krisis, jurang disparitas antara provinsi kaya dan tidak kaya menjadi semakin dalam.

Dengan migas, disparitas yang terjadi di dalam (*within*) provinsi kaya relatif lebih tinggi dibandingkan yang terjadi di dalam (*within*) provinsi tidak kaya. Namun jika migas dikeluarkan, disparitas yang terjadi di dalam (*within*) provinsi tidak kaya menjadi besar. kondisi ini menunjukkan bahwa hasil migas yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Pusat berkontribusi dalam menciptakan kesenjangan daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Koefisien disparitas *between* Jawa dan luar Jawa yang hanya sebesar 0,18 persen dari total koefisien Theil di tahun 2001 menunjukkan bahwa disparitas pendapatan per kapita antara Jawa dan luar Jawa relatif kecil. Memang benar, Jawa menyumbang 60 persen dalam pembentukan PDB total, namun jumlah penduduk yang mendiami wilayah Jawa juga mencapai hampir 60 persen dari total penduduk Indonesia. Artinya, perbandingan PDRB relatif terhadap jumlah penduduk sama dengan wilayah

lainnya. Kondisi yang serupa juga berlaku bagi Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Pada tahun yang sama, koefisien disparitas *within* Jawa menyumbang sebesar 56,77 persen dari total koefisien Theil dan koefisien disparitas *within* Luar Jawa menyumbang sebesar 43,05 persen dari total koefisien Theil. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas juga terjadi secara terpisah masing-masing di dalam (*within*) wilayah Jawa dan luar Jawa. Selain itu, disparitas juga terjadi di dalam KBI dan KTI. Baik dengan ataupun tanpa migas, disparitas *within* KBI dan *within* KTI menyumbang lebih dari 95 persen terhadap total koefisien disparitas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa disparitas antara (*between*) DKI Jakarta dan daerah lainnya sangatlah tinggi. Dengan migas, pada tahun 2001 disparitas antara DKI Jakarta dan luar DKI Jakarta menyumbang lebih dari 50 persen kepada total disparitas regional. Di tahun yang sama, jika analisis dilakukan dengan mengeluarkan migas, DKI Jakarta menyumbang sebesar 73,70 persen dari total disparitas antardaerah. Tidak ada perubahan pada posisi DKI Jakarta selama periode 1983 – 2001. DKI Jakarta tetap merupakan provinsi dengan pendapatan per kapita tertinggi, sedangkan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan pendapatan per kapita yang paling rendah.

Kondisi serupa juga terjadi dengan provinsi-provinsi yang memiliki pendapatan per kapita di atas rata-rata nasional. Provinsi-provinsi kaya tersebut, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua, semakin lama semakin memperbesar

jurang kesenjangan dengan provinsi-provinsi lainnya.

Rekomendasi

Perlu usaha sungguh-sungguh para perencana untuk menetapkan program pembangunan daerah yang mampu mengurangi disparitas regional. Untuk itu, beberapa rekomendasi yang diajukan:

1. Disparitas pembangunan antardaerah sebaiknya tidak hanya dilihat dari kacamata Jawa – luar Jawa atau kawasan barat dan kawasan timur. Perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional harus memperhatikan daerah (provinsi) secara parsial. Setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki potensi untuk berkembang dengan kekuatan mereka sendiri.
2. Perlu suatu kebijakan yang dapat membatasi pemusatan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta, misalnya dengan membatasi izin pendirian pabrik baru, mengarahkan investasi ke provinsi lain terutama ke provinsi-provinsi yang masih 'miskin'.
3. Mengurangi disparitas antardaerah dapat dilakukan dengan mengadakan kerja sama antardaerah melalui kegiatan pengumpulan data bersama, membuat kebijakan yang terintegrasi, dan membangun mekanisme kompensasi dalam pemanfaatan sumber daya secara bersama dengan daerah lain. Penyediaan infrastruktur penghubung antardaerah merupakan faktor sangat mendesak untuk mendorong terjadinya kerja sama antardaerah dan menghindari terjadinya pemusatan kegiatan ekonomi di daerah kaya.

4. Perlu ada studi lanjutan untuk melihat disparitas antarwilayah-wilayah tersebut dengan menggunakan variabel-variabel yang lebih luas seperti infrastruktur fisik, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan serta besaran

investasi dari dalam negeri dan luar negeri. Mengeluarkan sektor pertambangan selain migas dalam analisis mungkin dapat menghasilkan gambaran yang lebih baik tentang kondisi regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akita, Takahiro dan Lukman R.A. (1995), "Interregional Inequalities in Indonesia: A Sectoral Decomposition Analysis for 1975-1992", *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 31 (2).
- Arsyad, Lincoln (1999), *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Barro, Robert J. (1997), *Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study*, MIT Press Cambridge.
- Brodjonegoro, Bambang P.S. (2002), "Perekonomian Daerah di Era Desentralisasi", Lecturer Notes, FE-UI.
- Higgins, Benjamin dan Savole, (1995), *Regional Development Theories & Their Application*, Transaction Publisher, New Brunswick, New Jersey.
- Hill, Hal (2001), *Ekonomi Indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit Murai Kencana, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat (1997), *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Lubis, Hamsar (1999), "Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Ekonomi*, 13 (VIII).
- Jhingan, M.L. (2000), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Riddell, Robert (1985), *Regional Development Policy*, Gower St. Martin's Press, New York.
- Tambunan, Tulus (2001), *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Terrasi, Marinella (1999), "Convergence and Divergence Across Italian Regions", *The Annals of Regional Science*, Springer Verlag.
- Todaro, Michael P. (2000), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta.